



# SIMALAKAMA UMP 2025

## Buruh Menerima, Pengusaha Ingatkan Ancaman PHK

Bagai makan buah simalakama, begitu peribahasa yang cocok menggambarkan kenaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen. Keputusan itu terkesan tergesa-gesa dengan menyisakan tanda tanya besar, soal formula kenaikan misalnya. Meski menerima dan tidak jadi melakukan demo massal, buruh mengaku bingung soal komponen-komponen yang dipakai untuk menghitung hingga muncul prosentase angka tersebut. Kalangan pengusaha mengatakan hingga kini belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025. Terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. Bila disimulasikan ke UMP DKI Jakarta, pada tahun 2024 upah Rp 5.067.381, artinya pada tahun 2025 akan naik sebesar Rp 329.379 menjadi Rp 5.396.760. Pebisnis pun menyinggung dampak buruk, mulai perlambatan ekonomi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Wajar pengusaha kecewa, sebab keputusan UMP kali ini memang dikabarkan tidak melibatkan kalangan dunia usaha. Pemerintah pun tampaknya sudah memprediksi potensi gelombang pemecatan pekerja. Buktinya, tanpa menunggu lama-lama Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan membentuk task force atau satuan tugas (satgas) terkait PHK.

Baca Hal 11....

### SIMULASI KENAIKAN UMP 2025 DI 5 PROVINSI DI PULAU JAWA

#### 1. UMP DKI Jakarta

UMP DKI Jakarta pada tahun 2024 naik 3,8 persen atau Rp 166.583 dari Rp 4.900.798 menjadi Rp 5.067.381. Upah ini akan kembali meningkat setelah ditetapkan naik 6,5 persen pada tahun 2025 atau sebesar Rp 329.379 menjadi Rp 5.396.760.

#### 2. UMP Jawa Timur

UMP Jawa Timur pada tahun 2024 naik 6,13 persen atau Rp 125.000 atau dari Rp 2.040.244 menjadi Rp 2.165.244 per bulan. Upah ini akan makin meningkat setelah ditetapkan naik pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau Rp 132.615 menjadi Rp 2.305.984 per bulan.

#### 3. UMP Banten

UMP Banten pada tahun 2024 naik 2,5 persen atau Rp 66.532 dari Rp 2.661.280 menjadi Rp 2.727.812 per bulan. Upah ini akan makin meningkat setelah ditetapkan naik pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen, sehingga UMP Banten 2025 naik Rp 177.307 menjadi Rp 2.905.119 per bulan.

#### 4. UMP Jawa Barat

UMP Jawa Barat 2024 naik 3,57 persen atau Rp 70.824 dari UMP tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 1.986.670. Upah tersebut akan meningkat setelah ditetapkan naik sebesar 6,5 persen atau Rp 204.562 menjadi Rp 2.191.232 per bulan.

#### 5. UMP Jawa Tengah

naik 4,02% atau Rp 78.778, dari Rp 1.958.169 menjadi Rp 2.036.947 per bulan, dan akan naik lagi 6,5% pada 2025 menjadi Rp 2.169.348.



### JUMLAH PEKERJA PHK

Jan-Aug 2023

37.375

NAIK ↑  
23.72

Jan-Aug 2024

46.240

**Government (Hal.2)**  
Makan Bergizi Gratis  
Dimulai 2 Januari,  
Anggaran Turun  
Jadi Rp 10 Ribu/  
Orang

### DAFTAR PROVINSI DENGAN PHK TERBANYAK SEPANJANG SEMESTER I 2024

DKI Jakarta	7.469
Banten	6.135
Jawa Barat	5.155
Jawa Tengah	4.275
Sulawesi Tengah	1.812

# Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari, Anggaran Turun Jadi Rp 10 Ribu/Orang

## DERETAN NEGARA BERIKAN MAKAN SIANG GRATIS DI SEKOLAH



### AMERIKA SERIKAT/AS

Selama Pandemi COVID-19 di New York City, Vermont, Nevada, California, Maine, Colorado



### BRASIL

Jangkauan 40 Juta Anak/Siswa Sejak 2009



### INDIA

Diberikan di Sekolah Sejak 1995



### INGGRIS

Diberikan kepada Semua Siswa Selama 3 Tahun Pertama Sekolah



### UNI EUROPA

25 dari 27 Negara Anggota Uni Eropa Punya Program Makan Siang Gratis untuk Anak-Anak



(Ilustrasi) Anggaran program makan bergizi gratis (MBG) akhirnya diputuskan sebesar Rp 10.000/orang. (Dok.ist)

tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan sebelumnya mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumpunya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah Rp10.000 itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program makan siang bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi merupakan langkah awal dalam simulasi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira akan terus berkembang," kata lelaki yang karib disapa Cak Imin itu dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2024) malam.

Ia menjelaskan bahwa besaran tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Cak Imin pun optimistis alokasi anggaran tersebut akan meningkat setiap tahunnya untuk memperluas

cakupan penerima manfaat.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," kata Cak Imin.

Ketua umum PKB itu juga mengatakan berencana melibatkan sekolah dan komunitas setempat dalam penyediaan makan bergizi. Secara otomatis, ibu-ibu juga akan ikut terlibat dalam program tersebut.

"Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi implementasinya, akan disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing.

Nantinya, jika ada daerah yang harga per sekali makan di bawah Rp 15.000 per anak, maka kelebihanannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (28/11/2024).

### Sorotan Warga

Sineas Ernest Prakasa turut mengomentari pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menetapkan anggaran MBG sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Awalnya, pemerintah menaksir

porsi per anak akan menghabiskan Rp15 ribu.

Melalui sebuah cuitan di akun X-nya, @ernestprakasa, pada Sabtu (30/11/2024), komika, aktor, produser, dan sutradara ini secara tidak langsung menyinggung besaran anggaran tersebut.

Menurutnya, anak-anak akan tetap bisa mendapatkan makan siang nasi, sayur dan satu lauk jika anggarannya tidak akan dikorupsi.

"Andai enggak dikorup, ini kayanya masih bisa dapet nasi, sayur, telur, tahu/tempe. Keyword: andai," cuitnya singkat.

Ernest Prakasa juga menyisipkan berita dari salah satu media online berjudul "Prabowo Tetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak".

Cuitan bintang film Cek Toko Sebelah ini pun mengundang bermacam-macam reaksi dari warganet. Namun, sebagian besar menyayangkan besaran anggaran yang dinilai terlalu kecil itu.

"Masih ada potongan pajak. Saat ini standar snack box di kabupaten/kota itu Rp15 ribu, potong pajak 10 persen. Kalau anggaran makan siang Rp10 ribu dikurang pajak Rp1.000, nett Rp9 ribu dapat apa?" tanya seorang warganet.

"Goals-nya program ini itu gizi dan nutrisinya untuk mendongkrak perkembangan atau yang penting makan aja?" kata warganet yang lain mengkritik.

Pertanyaan masyarakat adalah dengan uang Rp10.000 akan mendapatkan menu apa? Menu dengan anggaran Rp10.000 tentu saja akan lebih terbatas dibandingkan menu seharga Rp15.000 untuk satu porsi.

Menu yang mungkin didapatkan dengan anggaran Rp10.000 adalah nasi, protein untuk lauk dan dua jenis sayur. Alternatif kedua adalah nasi, lauk, satu jenis sayur, dan potongan buah.

Pilihan lauk sebagai sumber protein bisa berasal dari telur, tempe dan tahu. Misalkan mu ikan, paling mungkin adalah potongan yang dibagi dua antara ekor atau kepala atau dengan ukuran yang lebih kecil.

Untuk lauk ayam masih bisa dimungkinkan dengan yakni berukuran kecil atau ukuran ayam dipotong 15 bagian.

Sementara untuk menu sayur masih bisa didapatkan dua jenis. Misalnya saja bayam, sop, kacang panjang, buncis, taoge, dan lainnya.

Perkiraan menu tersebut realistis jika melihat harga makanan yang ada di kedai makanan. (wid, ist, din, rls, ant/dya)

**JAKARTA**-Program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Namun nominal anggarannya berubah, turun dari rencana Rp15.000/orang menjadi Rp 10.000/orang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan dikutip dari Antara, Minggu (1/12/2024).

Hasan menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian. Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada

# Lagi-lagi Gaduh Usulan Gubernur Dipilih DPRD

## SEJARAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

### A. Periode 2004-2014

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang mengalami dua perubahan, terakhir pada 28 April 2008, untuk mengadaptasi amandemen UUD 1945, Pasal 18 ayat 4, yang mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis.
- Pada 28 April 2008, Presiden SBY menerbitkan UU No. 12 Tahun 2008 yang mengubah UU No. 32 Tahun 2004, memberikan kebebasan bagi calon kepala daerah untuk mencalonkan diri tanpa bergabung dengan partai politik.
- Pada 30 September 2014, SBY mengesahkan UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD, namun mendapat penolakan publik, sehingga diterbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014.
- Pada 2 Oktober 2014, setelah persetujuan DPR dan pemerintah, UU No. 1 Tahun 2015 mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang.

### B. Periode 2015-sekarang

- Presiden terbaru pada saat itu, Ir. Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Kemudian undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang 10 Tahun 2016 inilah undang-undang yang mengatur tentang Pilkada hingga saat ini.



(Ilustrasi) Petugas menyelamatkan kotak suara di Kabupaten Rokan Hulu yang sempat terendam banjir. Ist

Dede menekankan pentingnya melakukan kajian akademik sebelum memastikan akan mendukung atau menolak usulan ini. Menurutnya, kajian akademik penting sebelum melakukan revisi terhadap aturan apa pun termasuk

Undang-undang Pemilu untuk memastikan perubahan ini didasarkan pada data dan analisis yang komprehensif, bukan hanya berdasarkan pertimbangan politis saja.

"Perlu tinjauan akademik dulu oleh para pakar terkait Revisi UU pemerintahan daerah, dan UU Pemilu nanti," kata Dede.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, mekanisme pemilihan langsung yang dianut saat ini lebih baik daripada usulan PKB. Usulan PKB menurutnya kembali ke mekanisme Orde Baru.

"Saya menilai, sejak Indonesia menerapkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, ternyata model ini menumbuhkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal yang dibutuhkan bangsa ini," kata Zulfikar saat dihubungi, Minggu (1/12/2024).

Zulfikar menjelaskan, Indonesia sudah pernah menganut sistem pemilihan mandat tunggal melalui penunjukan DPRD saat era awal Orde Baru hingga sebelum era reformasi.

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh DPRD.

Namun, proses ini malah membuat pemerintahan di daerah diintervensi oleh pemerintah pusat, membuat kepala daerah seolah-olah hanya bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat dan DPRD saja.

"Bila dipilih oleh DPRD, rakyat hanya sebagai penonton saja," kata Zulfikar.

Setelah mengalami mekanisme pemilihan langsung secara perdana 2005, Zulfikar menilai Indonesia menjadi lebih demokratis.

"Sejak Pilkada langsung 2005. Bisa kita saksikan di berbagai wilayah di Indonesia, para kandidat berlomba

membuat tawaran kebijakan, program, dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya," kata Zulfikar.

"Mereka berjuang memenangkan simpati dan hati rakyat melalui tawaran kebijakan, program, dan kegiatan tersebut diiringi tampilan pola tingkah personal dan keluarga yang prioritasnya kesanggupan untuk mensejahterakan dan melayani rakyat di tingkat lokal," tuturnya.

Pemilihan langsung, kata Zulfikar juga bisa berdampak bagi kualitas para kader partai karena mau tidak mau harus bersaing jika ingin dipilih oleh rakyat.

Dengan begitu, menurutnya mekanisme pemilihan langsung yang dianut saat ini sudah tepat dan tidak perlu diubah kembali menjadi seperti saat Orde Baru dulu.

"Demokrasi lokal kita sudah berjalan di rel yang benar saat ini. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita bisa memitigasi pelbagai dampak negatif dari model pemilihan langsung ini," pungkasnya.

### Biaya Mahal

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai usulan agar DPRD diberikan wewenang untuk menentukan gubernur bisa memangkas biaya Pemilu.

Menurut Jazilul biaya yang dikeluarkan untuk pilgub tidak sebanding dengan hasilnya. Ia juga menyinggung partisipasi masyarakat yang dianggap masih rendah..

"Pilgub berbiaya tinggi namun partisipasi masyarakat rendah, hasilnya juga biasa-biasa saja," kata Jazilul. Politikus PKB itu mencontohkan biaya Pilgub Jawa Barat yang mencapai Rp1 triliun pada Pilkada serentak 2024.

Jazilul menyebut bahwa otonomi daerah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pilkada secara langsung di tingkat provinsi harus dievaluasi.

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat harus mendapat

kesempatan untuk partisipasi. Kendati demikian, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.

Persoalan biaya politik itu, kata Jazilul, harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada

Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun anggota legislatif secara saksama.

Ia berpendapat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden.

Upaya memilih Kepala Daerah melalui mekanisme DPRD pernah digulirkan pada tahun 2014. Namun upaya tersebut kandas. Kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu yang mencabut UU no 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD. Pemilihan Kepala Daerah tetap melalui mekanisme pemilihan langsung.

Sejumlah kalangan kala itu menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mereka menilai pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah hal konyol dan tak sejalan dengan semangat reformasi. Beberapa pengamat berpendapat transaksi politik uang justru akan makin marak bila Pilkada diserahkan ke DPRD.

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara soal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, seluruh pihak harus berupaya menghadirkan demokrasi yang efektif.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditanya mengenai kabar bahwa PKB tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Pertimbangan itu, lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.

"Semuanya harus memikirkan cara-cara supaya demokrasi kita efektif, sehat, tidak menggunakan uang, dan tidak menggunakan berbagai cara yang non dmeorkatis," kata Cak Imin kepada wartawan du Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Cak Imin juga menyangkan adanya politik uang atau money politic mewarnai Pilkada serentak 2024. Dia mengaku mendapat kabar bahwa untuk bisa mengamankan satu suara rakyat, dibutuhkan minimal Rp300 ribu. (wid, din, tar, ist, ant/dya)

**JAKARTA**-Komisi II DPR RI menanggapi usulan agar pemilihan gubernur dievaluasi. Nantinya, pemilihan gubernur diusulkan dilakukan berdasarkan usulan DPRD.

Usul ini disampaikan oleh PKB. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, mengatakan usulan ini masih perlu dibicarakan bersama.

"Semua opsi boleh dibicarakan," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Minggu (1/12/2024).

Politisi Demokrat itu mengatakan, masih perlu dilihat secara objektif apakah peran gubernur saat ini lebih dominan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau menjadi representasi daerah pemilihannya.

Menurutnya, ini berkaitan dengan sikap Komisi II nantinya dalam mengkaji usulan PKB. "Nanti dilihat dulu peran gubernur apakah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, atau mewakili kepentingan daerah pemilihannya," katanya.

## DKP Jatim Gelar Sosialisasi Pelestarian Ikan Lokal dan Penebaran Benih di Waduk Sangiran Ngawi



**NGAWI**-Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang terjangkau oleh hampir sebagian besar lapisan masyarakat. Selain mengandung banyak asam amino esensial, ikan juga mengandung omega-3, omega-5 dan omega-6.

Kesemuanya berperan dalam mengontrol kadar kolesterol dalam darah serta untuk pertumbuhan otak terutama bagi balita dan anak-anak. Peningkatan produksi pada usaha budidaya ikan, diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan sumber protein hewani asal ikan, tetapi sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen yang terlibat dalam proses produksi terutama pembudidaya ikan.

Jawa Timur (Jatim) sebagai daerah dengan potensi perikanan yang cukup besar harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk

masyarakat. Terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

Saat ini ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Penebaran Benih Ikan Lokal Jawa Timur yang menjadi salah satu aksi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim ikut berperan aktif berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan protein. Hal ini juga dalam rangka ketahanan pangan bagi masyarakat guna menciptakan generasi yang sehat dan kuat dan menekan angka stunting.

Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 79, DKP Provinsi Jawa Timur melaksanakan penebaran 79.000 ekor benih ikan lokal pada Rabu, 30 Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Waduk Sangiran, Desa Sumberbening Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi.

Beberapa jenis ikan lokal yang ditebar pada kegiatan kali ini adalah ikan tawes, ikan baderbang, ikan nilam, ikan wader, ikan muraganting, ikan sengkaring dan udang galah. Jenis ikan yang ditebar ini merupakan jenis ikan yang telah disesuaikan dengan kondisi perairan di lingkungan tersebut dengan tetap mempertahankan ekosistem perairan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar, Camat Beringin Kabupaten

Ngawi, Akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya Sub Koordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan, UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Kelompok pengelola perahu di Waduk Sangiran, Guru dan siswa SMK 1 Bringin, Penyuluh perikanan dan staf dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi serta masyarakat setempat.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pelestarian ikan lokal yang menghadirkan pemateri dari Universitas Airlangga dan Seksi Pengendalian lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan. Tujuan dari kegiatan tebar benih ini adalah untuk melestarikan ikan lokal di Jawa Timur serta membantu meningkatkan stok ikan di perairan yang bisa mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. (Adv)

## Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito



**JAKARTA** - Wacana Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali mencuat.

Sinyal pembentukan nomenklatur baru itu diembuskan oleh adik Prabowo, Hashim Djohadikusumo. Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan

Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

Hashim menyebut kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

"Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran," kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ia juga membocorkan Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya.

"Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri

Perlindungan Negara yang baru," imbuhnya.

Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun Hashim mengklaim wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

"Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," pungkasnya.

Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap

Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteriya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).. (Wis, rls, ant/dya)

# Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap di Pantai Gerangan Tulungagung



**TULUNGAGUNG** – Seksi Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan (s.d)10 GT di Pantai Gerangan, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari nelayan – nelayan dan pemilik kapal berukuran s.d 0-10 GT serta Penyuluh Perikanan, Satwas SDKP Tulungagung dan UPT

Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh. Hadir menjadi narasumber diantaranya Ulul Azmi, S.E. selaku Kepala Bidang Pengolahan Perikanan Tangkap – Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dan Angga Bahtera S., S.Pi. selaku Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dinilai sangat penting karena dengan memiliki dokumen Perizinan Nomer Induk

Berusaha, Tanda Daftar Kapal Perikanan maupun Buku Kapal Perikanan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum (legalitas usaha). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan fasilitasi mengenai Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) secara Single Sign On (SSO) untuk penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Serta Pelayanan Non Izin Elektronik Buku Kapal Perikanan E-BKP melalui

SIPALKA. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini seluruh nelayan kecil maupun besar dan pemilik kapal segera memiliki dokumen perizinan kapal perikanan diantaranya adalah NIB, Pas Kecil/Besar dan E-BKP. Sebab, dengan dokumen perizinan tersebut nelayan bisa mendapatkan kejelasan status hukum, subsidi BBM, terdata di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bantuan hibah, akses pemasaran, serta ketenangan dalam berlayar dalam mencari ikan. (Adv)

## KPU: Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan Pilkada 2024 Digelar di 287 TPS

**JAKARTA** - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengatakan pemungutan suara susulan (PSS), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 akan digelar di 287 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin merincikan, PSS akan dilaksanakan di 231 TPS, PSL akan dilaksanakan di 10 TPS, kemudian PSU akan dilaksanakan di 46 TPS.

“Adapun beberapa alasan dilaksanakan PSS, PSL dan PSU antara lain karena bencana alam, gangguan keamanan, kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih, serta adanya rekomendasi dari Bawaslu,” ucap Afif dikutip Minggu (1/12/2024).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik merinci PSU, PSL, dan PSS akan digelar di 44 kabupaten atau kota yang tersebar di 22 provinsi. Adapun jumlah pemilih keseluruhan di 22 provinsi tersebut adalah 132.286 orang.

Sementara soal pilkada lanjutan akan digelar pada September 2025 jika

paslon tidak memperoleh suara 50 persen pada Pilkada Serentak 2024. “Jika paslon tunggal dalam pilkada tahun ini tidak memperoleh suara sampai 50 persen maka akan dilaksanakan pilkada lanjutan pada September 2025,” kata Idham Holik saat memonitoring rekapitulasi perolehan suara di KPU Pangkalpinang, Minggu (1/12/2024).

Ia mengatakan pilkada lanjutan ini berdasarkan Pasal 54 d ayat 2 dan 3 serta hasil rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri, jika memang paslon tunggal dalam pilkada tahun ini tidak memperoleh suara sampai 50 persen, maka akan diselenggarakan pilkada lanjutan yang akan diselenggarakan pada September 2025.

“Ini tentunya akan kami konsultasikan kembali dengan pembentuk undang-undang dan ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilkada lanjutan dilaksanakan paling lambat satu tahun semenjak dilaksanakan pemungutan suara pilkada serentak tahun ini pada Rabu (27/11/2024),” katanya. (wid, din, ant/dya)

### Perincian TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, susulan, atau lanjutan di Pilkada

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1. Aceh</b><br/>1 PSU di Kota Banda Aceh.</p>   | <p><b>9. Kalimantan Timur</b><br/>1 PSU di Balikpapan<br/>1 PSU di Samarinda.</p>                       | <p><b>18. Sulawesi Barat</b><br/>1 PSU di Kabupaten Mamasa<br/>1 PSU di Kabupaten Pasangkayu.</p>  |
| <p><b>2. Banten</b><br/>1 PSU di Kota Tangerang Selatan.</p>  | <p><b>10. Kalimantan Utara</b><br/>1 PSU di Kabupaten Malinau.</p>                                      | <p><b>19. Sulawesi Selatan</b><br/>1 PSU di Kabupaten Tana Toraja.</p>   |
| <p><b>3. Jambi</b><br/>5 PSU di Kota Sungai Penuh.</p>  | <p>11. Kepulauan Riau<br/>1 PSU di Kota Tanjung Pinang.</p>   | <p><b>20. Sumatera Barat</b><br/>1 PSU di Kabupaten Dharmasraya<br/>1 PSU di Kabupaten Tanah Datar.</p>  |
| <p><b>4. Jawa Barat</b><br/>1 PSL di Kabupaten Karawang<br/>1 PSU di Kabupaten Sukabumi<br/>1 PSU di Kota Bandung.</p>  | <p><b>12. Maluku</b><br/>1 PSU di Kabupaten Maluku Barat Daya<br/>1 PSU di Kabupaten Maluku Tengah.</p> | <p><b>21. Sumatera Selatan</b><br/>2 PSU di Kabupaten Ogan Komering Ilir<br/>1 PSU di Kota Pagar Alam<br/>3 PSU di Kota Palembang.</p>   |
| <p><b>5. Jawa Tengah</b><br/>1 PSU di Kabupaten Karanganyar<br/>1 PSU di Kabupaten Pemalang.</p>  | <p><b>13. Maluku Utara</b><br/>1 PSU di Kota Ternate.</p>   | <p><b>22. Sumatera Utara</b><br/>2 PSS di Kabupaten Asahan<br/>1 PSL dan 30 PSS di Kabupaten Deli Serdang<br/>20 PSS di Kota Binjai<br/>7 PSL dan 4 PSS di Kota Medan<br/>2 PSS dan 2 PSU di Kabupaten Nias<br/>2 PSS dan 2 PSU di Kabupaten Nias Selatan.</p> |
| <p><b>6. Jawa Timur</b><br/>2 PSU di Kabupaten Bangkalan<br/>1 PSU di Kabupaten Bondowoso<br/>1 PSU di Kabupaten Sumenep.</p>   | <p><b>14. Papua:</b><br/>1 PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen<br/>5 PSL di Kabupaten Sarmi.</p>           | <p><b>16. Papua Pegunungan</b><br/>35 PSS di Kabupaten Yahukimo.</p>   |
| <p><b>7. Kalimantan Barat</b><br/>2 PSU di Kabupaten Landak<br/>1 PSU di Kabupaten Melawi.</p>  | <p><b>15. Papua Barat Daya</b><br/>2 PSU di Kabupaten Maybrat.</p>                                      | <p><b>17. Papua Tengah</b><br/>1 PSL di Kabupaten Nabire<br/>82 PSS di Kabupaten Puncak.</p>   |
| <p><b>8. Kalimantan Tengah</b><br/>2 PSU di Kabupaten Barito Selatan<br/>1 PSU di Kabupaten Kapuas<br/>1 PSU di Kabupaten Katingan<br/>2 PSU di Kota Palangka Raya.</p> |   |  |



## Banjir dan Longsor Rusak Jembatan, Pekab Malang Siapkan Rp 2 M untuk Perbaikan

**MALANG** - Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, kerusakan infrastruktur terutama jembatan ambrol terjadi di beberapa titik.

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Malang telah bersiaga dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 miliar untuk perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan berat. Sementara biaya untuk jembatan rusak ringan dan sedang akan menyesuaikan.

"Mulai Jumat kemarin kami melakukan peninjauan khususnya pada titik-titik dengan kerusakan infrastruktur paling parah. Lima titik sudah ditinjau, rata-rata memang jembatan yang perlu perbaikan, ada yang (perbaikan) total karena rusak berat," ujar Sanusi, Minggu (1/12/2024).

Sanusi menambahkan, salah satu jembatan dengan kerusakan paling serius berada di Kecamatan Donomulyo, yang memerlukan pembangunan ulang. Adapun selain Donomulyo, 4 kecamatan lain yang terdampak juga menjadi perhatian Sanusi, yakni Kalipare, Bantur, Pagak, dan Sumbermanjing Wetan.

Lebih lanjut, Sanusi menyampaikan Pemkab Malang akan mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 miliar untuk jembatan dengan kerusakan parah, namun jumlah ini akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing jembatan.

"Dari pemantauan kemarin, kami lihat tingkat kerusakannya maka yang memungkinkan untuk dibantu, akan dibantu. Untuk penanganan bencana alam sudah tercover dalam APBD. Jadi, bisa langsung dilakukan penanganan dan perbaikan yang rencananya dianggarkan di tahun 2026. Khusus kerusakan yang parah akan dibenahi di tahun 2025, maksimal bisa mencapai Rp 2 miliar, jelasnya.

Diketahui, kerusakan infrastruktur ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Malang sejak Kamis (28/11/2024). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, banjir dan longsor yang melanda 5 kecamatan ini bahkan lebih luas dibandingkan dengan kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kejadian seperti ini belum pernah terjadi dengan skala sebesar ini.

Sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kami meningkatkan ke-siagaan, termasuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam tanggap bencana," sambung Sanusi.

"Yang utama adalah keselamatan masyarakat. Kerusakan fisik bisa ditangani setelahnya. Kami berharap ini menjadi yang terakhir dan tidak terjadi lagi ke depan," tutupnya.

Sebagai informasi, banjir yang dipicu curah hujan tinggi sepanjang Kamis (28/11/2024) lalu, telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan dampak lainnya di beberapa wilayah. Di Kecamatan Pagak, tepatnya di Raya Sumberejo (Gunung Geger), terjadi dua titik longsor yang menghambat arus lalu lintas. Sementara itu, di Kecamatan Kalipare, tiga rumah tergenang air,



Bupati Malang, Sanusi saat melakukan tinjauan ke salah satu titik lokasi terdampak bencana longsor, Sabtu (30/11/2024). (dok. Prokopim Kab Malang)

yang berdampak pada sembilan jiwa, termasuk satu balita berusia 2,5 tahun.

Di Kecamatan Bantur, sekitar 30 rumah dan kantor kecamatan terendam air setinggi sekitar 50 sentimeter, sementara pondasi jembatan penghubung desa tergerus sepanjang 30-40 meter. Selain itu, di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tercatat enam titik longsor yang sempat menutup total akses jalan. (Santi/Dya)

## Sempat Diproyeksi Turun, Target PAD 2025 Kota Malang Disepakati Naik Andalkan Retribusi



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita. (Santi/Lenteratoday)

**MALANG** - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 akhirnya disepakati naik sebesar Rp 22,6 miliar, menjadi Rp 1,03 triliun. Keputusan ini berbeda dengan proyeksi PAD dalam KUA-PPAS 2025 yang sempat mengindikasikan penurunan target.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, mengatakan

naiknya target tersebut bertumpu pada optimalisasi potensi retribusi dari berbagai sektor yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Setelah rapat badan anggaran (Banggar), kami memetakan ulang retribusi dan pajak mana saja yang masih bisa dinaikkan. Hasil diskusi menunjukkan ada beberapa sektor retribusi yang potensial untuk mendongkrak PAD, terutama dari Disporapar dan DLH," ujar Amithya, Minggu (1/12/2024).

Kenaikan target PAD sebagian besar berasal dari peningkatan retribusi. Di antaranya, yakni Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) naik Rp 2 miliar, Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) naik Rp 1 miliar, dan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) naik Rp 26 juta.

"Potensi retribusi dari beberapa sektor besar menjadi andalan, terutama dari persewaan Barang Milik Daerah (BMD) di Disporapar, serta sektor lainnya yang dikelola DLH. Peluang ini muncul di penghujung tahun, sehingga dalam pembahasan RAPBD, kami formalisasi dan tetapkan kenaikan target tersebut," tambah perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini.

Meski optimis, Mia tak menampik adanya tantangan berat dalam realisasi capaian target PAD nantinya. Menurut Mia, beberapa sektor pajak diketahui belum mencapai target di tahun 2024 ini. PAD tahun ini bahkan diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 600 miliar lebih, jauh dari target Rp 700 miliar.

"Tapi kami sudah minta agar Pemkot memastikan bahwa target yang dipatok realistis dan disertakan dalam Surat Keputusan (SK). Jangan sampai target dinaikkan tanpa perhitungan, lalu gagal dicapai. Apalagi sekarang ada sistem MCP KPK yang mengawasi rasionalitas target pendapatan," jelasnya.

Dalam hal ini, Mia juga menyinggung agar kenaikan target PAD tidak hanya menjadi formalitas

demis mengejar angka. Ia meminta pemerintah fokus pada strategi yang realistis dan berkelanjutan. "Jangan sampai demi memenuhi target, angkanya diturunkan agar terlihat tercapai. Kita harus fokus pada optimalisasi potensi yang ada," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam RAPBD 2025, PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 1,03 triliun, naik Rp 22,6 miliar dari proyeksi KUA-PPAS yang hanya Rp 1,01 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh beberapa sektor retribusi seperti Retribusi Pemakaian Alat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) sebesar Rp 25 juta dan Retribusi Pemakaian Laboratorium di dinas yang sama sebesar Rp 7 juta.

Di sektor pariwisata, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) juga ditargetkan naik Rp 317 juta. Selain itu, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Tenaga Kerja PMPTSP menjadi salah satu penyumbang signifikan dengan kenaikan target sebesar Rp 5 miliar. (Santi/Dya)

# Perjalanan Jeje Govinda Dari Musisi, Kini Unggul di Pilkada Bandung Barat

**RITCHIE ISMAIL**, yang lebih dikenal dengan nama Jeje Govinda, baru saja merayakan kemenangan sementara dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024. Dalam hasil quick count Pilkada 2024 menunjukkan keunggulannya bersama pasangannya, Asep Ismail.

Jeje Govinda sendiri tidak menempuh perjalanan mudah dalam kompetisi politik ini. Berpasangan dengan Asep Ismail, ia harus bersaing ketat melawan dua publik figur lain, yakni Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga. Namun, kerja keras dan dukungan dari masyarakat serta partai pengusungnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra, akhirnya membuahkan hasil yang positif.

## Perjalanan Karier di Dunia Hiburan

Jeje Govinda lahir di Jakarta, 22 April 1983. Ia mulai dikenal luas sebagai drummer Govinda, grup musik yang membawanya ke puncak popularitas di dunia hiburan Indonesia. Namanya semakin dikenal setelah menikahi aktris Syahnaz Sadiqah, adik dari Raffi Ahmad, pada 21 April 2018 lalu. Pernikahan ini juga menghubungkan Jeje dengan keluarga besar RANS Entertainment, yang turut meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat.

Sebagai pecinta musik, ayah dari sepasang anak kembar ini diketahui telah lama mengawali karier musiknya, yakni ketika mengikuti ajang kompetisi The Dream Band. Bahkan, setelah itu, ia tercatat pernah tergabung dalam beberapa band, seperti IZE, Domino, Sinar Poesaka, dan Olif.

Pada tahun 2008, Jeje bergabung dan memulai debut musik dalam grup Govinda, bersama 3 personel lainnya, yakni Ade, Ifan, dan Luki. Nama grup Govinda dulunya adalah Domino, sebelum berubah dan meroket sebagai Govinda.

Waktu ke waktu, nama Jeje kian terkenal. Bahkan, dirinya tak tanggung-tanggung terus melebarkan sayap kariernya. Drummer band ini dengan semangat mencoba hal-hal baru, seperti memulai debut aktingnya di salah satu FTV.

Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa selain menjadi drummer dan aktor, dirinya juga bekerja sebagai seorang Artist &

Repertoire (A&R) di salah satu perusahaan rekaman ternama di Indonesia.

## Perjalanan Karier di Dunia Politik

Kini, selain aktif sebagai musisi, Jeje juga berkecimpung di dunia politik sebagai kader PAN. Pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Asep Ismail. Dengan dukungan penuh dari partai politiknya, pasangan ini berhasil menarik perhatian masyarakat Bandung Barat.

Saat hasil sementara quick count Pilkada 2024 menunjukkan keunggulan mereka, Jeje tidak kuasa menahan tangis. Di momen yang emosional ini, ia mengungkapkan kerinduan kepada ibunya, Farida Budyarti, yang telah meninggal dunia.

"Maaf saya emosional, sebetulnya saya ingin ibu saya melihat kemenangan ini. Intinya hari ini kita sudah mendapatkan hasil, itu artinya masyarakat sudah percaya terhadap saya dan Pak Asep," katanya.

Setelah pengumuman tersebut, suasana semakin haru saat Jeje, Asep, dan tim pemenang bersama-sama melakukan sujud syukur. Sujud itu menjadi bentuk rasa syukur mereka atas kepercayaan masyarakat Bandung Barat yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 ini.

Walau belum diumumkan secara resmi terkait kemenangannya, tapi hal ini bisa jadi awal kiprah nyata yang akan dilakukan Jeje Govinda dari yang tadinya hanya seorang musisi yang dicintai banyak orang, kini Jeje menjelma menjadi sosok pemimpin yang siap membawa perubahan positif bagi daerah Bandung Barat.

## Alasan Jeje Govinda Terjun ke Dunia Politik

Sebelumnya Raffi Ahmad sempat mengulik alasan Jeje Govinda terjun ke dunia politik.

Bahkan menurut Raffi Ahmad, Jeje Govinda memiliki alasan yang menarik.

Jeje Govinda rupanya ingin membuktikan nilai lebih dirinya di mata publik yang sempat nyinyir imbas masalah rumah tangga yang dialaminya.

Selain itu, Jeje Govinda juga

mengaku ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan terjun ke dunia politik.

Ia berharap dapat memberikan beragam hal positif nantinya.

"Yang pasti awalnya di Jabar dulu, gue pengen mengabdikan ke kampung halaman juga. Untuk ke depannya buat negara kita juga. Sebenarnya ya pengen bermanfaat aja sih gue, pengen bisa ngasih hal-hal positif ke masyarakat," ungkap Jeje Govinda.

Jeje kemudian membeberkeran alasannya maju sebagai caleg pada pesta demokrasi mendatang.

"Kenapa saya masuk PAN, sebenarnya sudah kenal lama, dari Raffi asal kenalnya, baru s e k a r a n g memberanikan diri, ini keinginan almarhum papa yang mau masuk politik, tapi belum kesampaian, akhirnya aku yang melanjutkan," kata Jeje Govinda saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PAN di

kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Istri dari Syahnaz Sadiqah itu juga mengaku merasa nyaman di PAN. Dia beralasan karena di PAN banyak artis-artis senior dan juga orang-orang dengan latar belakang musik yang sebelumnya bergabung.

"PAN itu banyak anak mudanya, banyak yang background musisi, artis, saya merasa nyaman diterima baik disini. Banyak senior yang udah sukses contohnya mas Eko, teh Dessy, mas Primus," tutur Jeje Govinda.

Jika nantinya terpilih, ayah dari dua anak itu ingin masuk ke komisi 10. Dia ingin fokus memperjuangkan hak-hak para musisi.

"Saya musisi dan pengen mengembangkan musisi di daerah, saya pengen memperjuangkan musisi agar mereka mendapatkan yang lebih adil, apalagi sekarang heboh soal royalti," jelas Jeje Govinda. (nei,ist/dya)



# Manfaat Kecap, Lawan Radikal Bebas hingga Cegah Anemia

**KECAP** adalah bumbu dapur yang hampir selalu digunakan dalam berbagai makanan khas Indonesia. Selain punya fungsi sebagai penambah rasa, kecap ternyata memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

Manfaat kecap bukan sekadar menghasilkan rasa manis pada makanan, tetapi juga bisa memberikan efek positif untuk kesehatan. Hal ini karena kecap terbuat dari kacang kedelai hitam yang kaya akan nutrisi.

Kandungan gizi kecap

Kecap adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai hitam yang ditambahkan bumbu, seperti gula aren, gula merah, atau garam.

Ada dua jenis kecap yang biasa digunakan, yaitu kecap manis dan kecap asin. Keduanya sama-sama terbuat dari kacang kedelai, tetapi rasa dan teksturnya berbeda.

Tekstur kecap manis biasanya kental dan diolah dengan tambahan gula merah atau gula aren.

Sebaliknya, kecap asin memiliki tekstur encer dan diberi tambahan garam atau ekstrakikan.

Kecap diketahui mengandung zat gizi yang baik untuk kesehatan. Berikut ini komposisi zat gizi dalam 100 gram kecap

## Apa saja manfaat kecap untuk kesehatan?

Berikut ini berbagai manfaat kecap untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui.

### 1. Memiliki sifat antioksidan

Bahan dasar pembuatan kecap yakni kacang kedelai hitam dikenal memiliki sifat antioksidan yang kuat.

Kandungan antioksidan dalam kacang kedelai hitam berasal dari senyawa antosianin, flavonoid, isoflavon, dan tanin.

Antioksidan dapat melawan radikal bebas, yakni molekul yang dapat menyebabkan kerusakan pada

sel tubuh.

### 2. Memperkuat tulang

Manfaat kecap selanjutnya untuk kesehatan adalah membantu memperkuat tulang. Hal ini karena kecap mengandung kalsium dan fosfor. Kedua mineral tersebut dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan kepadatan mineral tulang sehingga tulang tidak mudah rapuh.

Tidak hanya itu, kalsium dan fosfor juga dapat mencegah risiko osteoporosis, yakni kondisi ketika tulang mengalami pengeroposan.

### 3. Menurunkan risiko penyakit jantung

Kandungan kacang kedelai hitam yang terdapat dalam kecap berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung. Sebuah studi dalam jurnal *Nutrients* menunjukkan bahwa kacang kedelai hitam mengandung polifenol yang dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah dengan menurunkan stres oksidatif.

Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kacang kedelai hitam mampu menurunkan tekanan darah.

Selain itu, kandungan antosianin di dalam kacang kedelai hitam mampu menurunkan trigliserida dan kolesterol LDL serta meningkatkan kolesterol HDL yang baik untuk menjaga kesehatan jantung.

### 4. Mencegah anemia

Anemia adalah penyakit yang ditandai dengan kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh.

Hemoglobin merupakan protein di dalam sel darah merah yang berperan mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh.

Nah, kecap mengandung zat besi yang dapat membantu pembentukan hemoglobin dalam tubuh. Dengan begitu, mengonsumsi kecap bisa mencegah risiko anemia.

### 5. Menurunkan risiko kanker

Kandungan senyawa isoflavon dalam kecap dapat berpotensi menurunkan risiko penyakit kanker.

Manfaat kecap satu ini disebutkan oleh sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *In Vivo*. Penelitian tersebut meninjau secara sistematis berbagai penelitian yang menguji isoflavon dalam kedelai

memiliki efek antikanker pada wanita menopause dan pramenopause.

Dalam tinjauan ini, isoflavon diketahui mampu menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel kanker payudara.

### 6. Baik dikonsumsi saat diet

Salah satu cara menurunkan berat badan adalah dengan memperhatikan pola makan, termasuk mengurangi asupan kalori harian.

Dalam hal ini, kecap bisa menjadi salah satu bahan makanan yang bisa Anda tambahkan untuk memperkaya rasa menu diet Anda sebagai pengganti saus tinggi kalori, seperti mayones. Kalori kecap rendah sehingga bisa memperkaya rasa makanan tanpa membuat asupan kalori harian Anda melonjak.

### 7. Mengurangi gejala menopause

Bahan utama pembuatan kecap, yakni kacang kedelai, mengandung senyawa isoflavon yang bermanfaat untuk mengurangi gejala menopause. Sebuah penelitian yang terbit dalam *British Journal of Clinical Pharmacology* mengungkapkan bahwa senyawa isoflavon di dalam kacang kedelai mampu mengurangi gejala hot flashes.

Meskipun begitu, efek isoflavon dalam mengurangi gejala hot flashes cenderung lebih sedikit dan lambat dibandingkan dengan estradiol, yakni obat untuk mengurangi gejala menopause.

### 8. Berpotensi mencegah diabetes tipe 2

Manfaat lain dari kecap untuk kesehatan adalah membantu mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2.

Studi dalam jurnal *Food Hydrocolloids* menunjukkan bahwa kandungan polisakarida dalam kacang kedelai hitam berpotensi mengurangi kadar gula dan lemak darah serta memengaruhi metabolisme tubuh.

Selain itu, polisakarida mampu mengubah komposisi bakteri tertentu di usus, seperti *Ruminococcus* dan *Oscillospira*, yang berkaitan dengan penurunan risiko diabetes.

Meski dapat berpotensi mengurangi risiko diabetes, tetap konsumsi kecap secukupnya. Pasalnya, kecap manis mengandung gula yang bisa meningkatkan kadar gula darah. (nei,ist/dya)





# TOSHIBA LUNCURKAN DISPENSER DENGAN UV STERILISASI



**DISPENSER AIR** merupakan perangkat rumah tangga yang sangat penting, mempermudah keluarga dalam menikmati air minum baik dingin maupun panas dengan cara yang praktis.

Dispenser Merawat agar tetap higienis sangat penting untuk memastikan kualitas udara yang dikonsumsi tetap bersih dan sehat. Untuk memenuhi kebutuhan air minum yang lebih sehat dan aman dikonsumsi, Toshiba menghadirkan Dispenser Air RWF-W1830UVBN(T) yang dirancang dengan teknologi canggih dan fitur inovatif.

“Dengan keunggulan seperti UV Sterilization, Eco Mode, dan material food grade, dispenser ini tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga menjamin keamanan udara yang dikonsumsi sehari-hari,” ujar Riswandi, Kitchen & Water Heating Product Manager Toshiba Lifestyle Indonesia dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin (28/11/2024).

Dirancang dengan teknologi terkini dan material berkualitas, dispenser galon bawah ini menawarkan kombinasi sempurna antara keamanan, efisiensi, dan kenyamanan bagi keluarga modern. Salah satu fitur unggulan Dispenser Toshiba adalah UV Sterilization, yang

menggunakan lampu UV untuk membunuh bakteri hingga 99,99%, sehingga memastikan udara yang Anda konsumsi tetap higienis dan aman.

Selain itu, dispenser ini dilengkapi dengan Eco Mode berbasis sensor cahaya, yang memungkinkan pemanas otomatis mati saat ruangan gelap, sehingga membantu menghemat energi hingga 20%. Komitmen Toshiba terhadap kualitas juga terlihat dari penggunaan material food grade stainless steel pada seluruh bagian yang bersentuhan dengan udara. Bahan ini dirancang untuk menjaga kebersihan air minum, menjadikannya aman untuk konsumsi harian.

Dispenser Toshiba juga dilengkapi sistem perlindungan pintar seperti Water Shortage Protection, yang secara otomatis mematikan pemanas dan pendingin ketika galon kosong untuk menjaga keamanan. Teknologi canggih lainnya, Deteksi Kebocoran Air, memungkinkan dispenser mendeteksi kebocoran udara dan langsung menghentikan aliran, disertai alarm sebagai peringatan.

Tak ketinggalan, dispenser ini dilengkapi LED Temperature Display yang menampilkan suhu air panas dan air dingin yang tersedia dalam tangki air. Touch Panel pada Dispenser

memudahkan pengguna untuk mengambil air cukup dengan sentuhan, tidak perlu memencet tombol.

Dispenser ini juga dilengkapi Quadruple Anti-Dry Burning Protection yaitu perlindungan 4 lapisan anti panas berlebih. Proses pemanasan akan otomatis mati ketika mencapai suhu maksimal untuk mencegah panas berlebih, sehingga lebih aman. Untuk menambah kenyamanan, Dispenser Toshiba juga hadir dengan desain bottom loading, memudahkan untuk mengganti galon tanpa perlu mengangkat beban berat.

“Melalui inovasi ini, Toshiba tidak hanya menawarkan dispenser air, tetapi juga solusi hidup yang lebih baik. Dengan desain modern, hemat energi, dan fitur-fitur keamanan unggulan. Dispenser Toshiba menjadi pilihan terbaik untuk keluarga yang mengutamakan kesehatan dan efisiensi,” kata Michael Adisuhanto, Head of Product Management Toshiba Lifestyle Indonesia. (nei,ist/dya)



# Karakteristik Dekorasi Rumah di Kalangan Gen Z

**GENERASI** muda selalu punya caranya sendiri untuk mengekspresikan diri, termasuk dalam mendekorasi rumah. Setiap generasi selalu menghadirkan tren desain interior baru. Seiring dengan munculnya Gen Z sebagai orang dewasa terbaru, selera desain mereka pun ikut berkembang.

Kini, saat banyak Gen Z (lahir antara 1997 hingga 2012) mulai mengusahakan punya rumah sendiri, mereka menghadirkan tren dekorasi yang segar dan unik. Menariknya, Gen Z suka dekorasi rumah dengan sentuhan gaya yang menggabungkan elemen lama dan baru.

Menurut desainer interior Nureed Saeed seperti mengutip Real Simple, Gen Z menyukai dekorasi rumah bergaya retro dengan karakteristik sebagai berikut!

## 1. Warna-Warna Berani dan Cerah

Gen Z dikenal tak takut bereksperimen dengan warna-warna cerah dan berani dalam dekorasi rumah mereka.

Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung memilih palet warna netral seperti abu-abu, Gen Z lebih tertarik pada palet warna beragam, seperti merah ceri yang mencolok atau hijau neon yang menyala.

Tren ini juga membawa kembali warna-warna ikonik dari era 90-an, seperti ungu yang mencuri perhatian di berbagai elemen, dari kabinet dapur hingga aksesoris rumah.

## 2. Dekorasi Thrifted dan Vintage

Banyak Gen Z yang memilih untuk menghiasi rumah mereka dengan barang-barang thrifted atau vintage.

Selain alasan finansial, kesadaran lingkungan mendorong mereka untuk mendaur ulang dan memilih dekorasi rumah bekas pakai daripada membeli yang baru.

Generasi Z gemar berburu perabotan unik di pasar loak atau online marketplace, mencari barang-barang yang memiliki cerita dan nilai historis.

## 3. Gingham dengan Sentuhan Modern

Gingham, motif klasik yang identik dengan gaya country, kembali populer berkat tren cottagecore yang membawa nuansa pedesaan ke dalam ruang hunian.

Gen Z memilih gingham dengan warna-warna yang tak biasa, seperti pink terang atau hijau neon, dan menggunakannya secara minimal pada bantal atau tirai. Warna-warna itu dikombinasikan dengan warna-warna solid modern agar tetap terlihat segar dan unik.

## 4. Kembali ke Era 90-an

Dari bantal berbentuk buah, lampu jamur, hingga elemen desain bergelombang yang mengingatkan pada tayangan anak-anak di TV, dekorasi rumah ala 90-an kembali populer di kalangan Gen Z.

Bahkan elemen-elemen berani seperti warna-warna asam dan motif-motif yang menggemaskan kini mengisi banyak ruang hunian Gen Z, menciptakan suasana yang penuh nostalgia namun tetap terasa modern.

## 5. Pencahayaan Lembut, Tanpa Lampu Plafon

Salah satu ciri khas dekorasi rumah Gen Z adalah penggunaan pencahayaan yang lembut tanpa

mengandalkan lampu plafon.

Alih-alih bergantung pada lampu yang terang dan cenderung besar, mereka lebih suka menggunakan pencahayaan tambahan seperti lampu dinding, lampu meja, hingga LED strip.

Tren ini dikenal sebagai dopamine decor, yang artinya setiap elemen dekorasi dirancang untuk memberikan efek bahagia dan nyaman di dalam rumah.

## 6. Pengaruh Postmodernisme

Gaya postmodernisme juga memengaruhi dekorasi rumah Gen Z. Gaya ini menonjolkan warna-warna terang, desain yang berani, serta elemen skulptural yang menciptakan visual estetik dan standout di setiap ruang.

Inspirasi ini tampak jelas pada rumah-rumah Gen Z, yang sering kali mengadopsi elemen dekorasi khas seperti bentuk geometris dan warna-warna kontras.

## 7. Multifungsi dan Nyaman

Gen Z menginginkan rumah mereka untuk menjadi tempat perlindungan yang ramah, bukan museum desain kaku yang hanya dilihat dan tidak pernah disentuh. Tujuan utama rumah bagi mereka adalah tempat yang nyaman untuk beristirahat. Selain itu, furnitur serbaguna dan elemen desain yang mudah beradaptasi juga menjadi

kunci, sehingga memungkinkan penggunaan ruang yang efisien, terutama di lingkungan tempat tinggal yang lebih kecil.

## 8. Merangkul teknologi

Tumbuh di era digital, Gen Z dengan mudah memadukan teknologi ke dalam dekorasi rumah. Perangkat rumah pintar dan fitur ramah teknologi lainnya adalah beberapa contoh yang mereka terapkan di rumah. Rumah mereka tidak hanya fungsional, tetapi juga merupakan pusat inovasi teknologi yang juga menyenangkan secara estetika.

## Tips Dekorasi Gaya Retro

Bagi kamu yang ingin menggunakan desain gaya retro di rumah, Rachman menyarankan untuk bisa dimulai dengan merencanakan desain berdasarkan furnitur, lampu atau era tertentu. Tak masalah jika kamu hanya menggunakan furnitur dari salah satu era saja, misalnya sofa velvet tahun 1970-an.

Selanjutnya, kamu bisa menggunakan warna-warna yang populer pada tahun 1970-an, seperti hijau alpukat, merah tomat, dan lainnya. Kamu juga bisa menambahkan aksen geometris, seperti di karpet, wallpaper, sarung bantal, dan lainnya. (nei,ist/dya)



**Simalakama UMP 2025 ... (dari Hal 1)**

**PENGUSAHA** menyampaikan kekhawatiran terhadap keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpandangan kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

"Dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan (UMP) ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia," ujar Shinta dilansir Minggu (1/12/2024).

Dengan kekhawatiran tersebut, Shinta menyebut akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar ke depannya.

Serta, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 5,2 persen di 2024 karena banyaknya lapangan kerja yang hilang.

Pengusaha juga mempertanyakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual.

"Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Penjelasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut," ujarnya.

Shinta menyatakan bahwa kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

"Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan," tambah Shinta.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyayangkan masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Menurutnya, Apindo

selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

"Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan," terang Bob.

**Buruh Akui Ada yang Mengganjal**

Dalam keterangan terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) juga mempertanyakan bagaimana hitungan sehingga angka itu muncul. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi.

"Presiden Prabowo umumkan sendiri soal kenaikan upah minimum yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, ini menandakan Presiden Prabowo lebih concern lebih memperhatikan soal nasib pekerja buruh Indonesia. Namun, saya agak kaget yang diumumkan angkanya dulu, bukan formulasi/rumus kenaikan upah yang sedang dibahas," kata dia dalam keterangannya.

Menurutnya ada hal yang mengganjal karena pemerintah tidak memberitahukan bagaimana formulasi penghitungan untuk kenaikan UMP 2025. Ristadi menyebut formulasi perhitungan itu sangat penting agar juga mengerek upah pekerja daerah.

"J a n g a n - j a n g a n n a n t i formulasinya dicocok-cocokkan agar hasilnya 6,5%, ini tidak logis. Jika demikian dan mengunci dewan pengupahan tidak berfungsi. Hal lainnya, dengan dirilisnya langsung angkanya sama 6,5% bukan formulasi/rumus kenaikannya maka ini akan mengakibatkan daerah yang upah minimumnya masih rendah akan semakin tertinggal jauh," ungkapnya.

Dia mencontohkan misalnya upah minimum di Karawang yang sudah sekitar Rp 5 juta/bulan. Jika kenaikannya 6,5% maka, UMP naik Rp 325.000. Sementara UMP di Yogyakarta yang berkisar Rp 2 jutaan, jadi naiknya hanya sekitar Rp 130.000.

"Ini akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pekerja yang sangat jauh dan ketidakmerataan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dampak lainnya pengusaha akan berpindah-pindah mencari upah yang lebih rendah," ucapnya.

Kecaman juga datang dari Serikat buruh di Indonesia. Mereka menyinggung soal naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen per Januari 2025. Menurutnya, angka

kenaikan UMP itu menjadi sia-sia.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyebut, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen bakal membuat upah para buruh di tahun depan tergelong minus.

"Kemudian juga katanya ada rencana PPN 12 persen. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka angka 6,5 persen menjadi sia-sia dan akan minus jatuhnya," ujar Mirah, Minggu (1/12/2024).

Mirah bilang, meskipun di satu sisi upah buruh naik 6,5 persen, tetapi jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan PPN 12 persen, maka jalan pintas bagi industri dan pengusaha ialah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK.

"Kalau pemerintah memaksa rencana kenaikan PPN 12 persen dengan satu sisi upah 6,5 persen gitu, ya kalau menurut saya sih, mungkin kalau bagi industri ya dia mengambil jalan pintas, jalan cepat ya PHK," katanya.

Selain itu, Mirah menilai, menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 harga pangan mengalami kenaikan yang cukup drastis di angka 20 persen, belum lagi rencana kenaikan harga energi seperti listrik, dan BBM di tahun depan.

"Harga pangan kan sudah lebih daripada itu, kenaikannya 20 persen. Kemudian, rencana pemerintah katanya tahun depan 2025, akan ada kenaikan listrik. Ya, kemudian juga BBM kita nggak pernah tahu, pasti akan naik lah tiap tahun," ungkap Mirah.

"Ya, buat apa ada naik 200 sampai 300 ribu (UMP) kalau kemudian diiringi dengan kenaikan harga barang rendah. Ini upahnya belum naik saja, barang udah naik nih menjelang Natal dan juga tahun baru. Itu udah naik semua untuk barang-barang pangan dan juga barang pokok," lanjutnya.

Dia menuturkan, satu-satunya komponen utama yang buruh butuhkan hanya kenaikan upah yang signifikan sebesar 20 persen. Pasalnya, kata Mirah, situasi ekonomi

dalam negeri masih belum semuanya ditanggung oleh negara.

"Pendidikan, kesehatan itu belum sepenuhnya gratis, transportasi publik juga belum gratis gitu ya di mana juga listrik juga masih belum subsidi dan BBM juga belum subsidi yang terlalu luas gitu. Maka satu-satunya komponen utama yang masih kita (buruh) andalkan adalah kenaikan upah," tutur Mirah.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan, kenaikan UMP 6,5 persen diikuti naiknya PPN 12 persen hanya akan mengundang industri untuk melakukan PHK besar-besaran.

"Kan kita sudah dengar ada sedikit resistensi dari pengusaha dan mereka (buruh) akan di PHK," jelasnya.

Namun, Elly menyebut, tuntutan kenaikan UMP buruh 6,5 persen di tahun depan bisa menambah daya beli buruh. Hanya saja, pemerintah harus dapat memastikan para pengusaha di industri tak melakukan PHK kepada buruh.

"Pemerintah dan pengusaha ini harus benar benar menjamin ketika ada kenaikan ini, nah ini harus dijalankan secara konkret di lapangan dan jangan ada PHK," ungkap dia.

"Yang kita pikirkan, kita apresiasi kenaikan UMP 6,5 persen tapi jangan dong ada kenaikan pajak 12 persen, kan nanti jadi nggak ada arti kenaikannya dong," tutupnya.

Berbeda dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang mengapresiasi, keputusan UMP "Saya sebagai Presiden Partai Buruh bersama kawan-kawan setuju dengan keputusan ini. Karena ini adalah langkah signifikan, mengingat lima tahun terakhir buruh Indonesia tidak mendapatkan perlindungan memadai," kata Said, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan tonggak sejarah karena Presiden langsung mengumumkan kenaikan upah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembalikan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan daya saing industri.(wid, ant, din, ist, rls/dya)



# Ramai Ide Polri di Bawah Kemendagri atau TNI, Sepakat?

**JAKARTA** - Sejumlah kalangan angkat bicara terkait ide agar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan, gagasan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI merupakan langkah mundur.

"Saran kami, kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah presiden," kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Berdasarkan kajian akademik, kata dia, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, di bawah kementerian manapun tidak akan menjamin Polri semakin baik bahkan dikhawatirkan semakin mundur.

Selain itu, kata dia, institusi Kepolisian yang berada di bawah kementerian lain juga semakin rawan intervensi pada penegakan hukum.

Polri di bawah presiden saja, intervensi bertubi-tubi datang dari segala penjuru, termasuk partai politik.

"Apalagi di bawah kementerian," kata dia.

Menurut dia, semestinya yang dibahas bukan Polri di bawah kementerian, tapi memberikan gagasan agar profesionalisme dan pengawasan Polri bisa ditingkatkan.

"Polri jangan diseret-seret ke ranah politik. Polri di bawah presiden memang itulah ciri khas Kepolisian Indonesia," katanya.

Edi melihat dengan di bawah presiden seperti saat ini, Polri diakui sebagai salah Kepolisian terbaik di dunia, berdasarkan laporan bertajuk "Global Law and Order 2022" yang diterbitkan lembaga jajak pendapat dunia, Gallup, pada 27 Oktober 2022. Gallup mewawancarai hampir 127.000 orang di lebih dari 120 negara pada 2021.

"Menurut Gallup, Polri berada pada urutan kelima terbaik di dunia, setelah Singapura, Tajikistan, Norwegia dan Swiss," katanya.

Pakar Hukum Tata Negara M. Junaidi menilai usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri sangatlah tidak pas. Sebab, Kemendagri lebih cenderung mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri, terutamanya yang berkaitan dengan pemerintahan



(ilustrasi) Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI merupakan langkah mundur. (Dok)

daerah (pemda).

Karena itu, ia menilai jika Polri ditarik ke bawah Kemendagri maka akan nanti terjadi tumpang tindih kewenangan hingga kontrol oleh presiden tak akan maksimal. Belum lagi, tugas Kemendagri yang berjibun akan semakin kompleks dan terbebani jika ditambah pula dengan mengurus Polri.

## Melenceng dari UUD 1945

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suparto Wijoyo menyebut wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 30, Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung pada Presiden," ujarnya di Surabaya.

Suparto menjelaskan, Polri sebagai lembaga negara yang independen, bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah atau kementerian lainnya.

Bila keberadaan Polri di bawah Kemendagri maupun kementerian lainnya, kata Suparto, ada kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kebijakan kementerian tertentu.

Ia menambahkan, hal ini bisa mengganggu obyektivitas dan profesionalisme kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia.

"Hal ini sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nasir Djamil menilai usulan

menempatkan institusi Polri berada di bawah kementerian belum relevan.

Alasannya, kata dia, ada sejumlah faktor yang membuat hal itu belum relevan, di antaranya karena pembangunan hukum yang belum sempurna, budaya hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang masih sulit, serta tingkat pendidikan yang rendah.

"Memang benar ada beberapa negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Akan tetapi, di Indonesia belum bisa dilakukan, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan," kata Nasir di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, dengan berbagai tantangan internal yang terjadi saat ini, menempatkan Polri di bawah kementerian dalam situasi ini justru akan memperburuk keadaan.

Dia menilai penempatan Korps Bhayangkara selaku institusi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sudah tepat.

Meski demikian, dia ingin Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia, terutama pada institusi Polri. Dia berpendapat peran Presiden sangat perlu untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Presiden sangat diharapkan berada di garda depan untuk memimpin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujarnya.

Menurut dia, pemberian sanksi tegas kepada anggota Polri juga harus dilakukan secara konsisten. Kepemimpinan di tubuh Polri harus menghadirkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat.

## Deretan Kasus Penembakan oleh Polisi

### Pembunuhan Brigadir Joshua di Jakarta Selatan

Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) mengemparkan publik sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023. Ia tewas ditembak rekannya sendiri, Bharada E, pada 8 Juli 2022 di rumah Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo, Jakarta Selatan, namun baru diumumkan tiga hari setelahnya. Sambo akhirnya divonis dengan hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana. Vonisnya diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara seumur hidup pada Agustus 2023.

### Penembakan anggota Polsek Wanasaba di Lombok Timur

Seorang oknum polisi anggota Polsek Wanasaba berinisial MN (38) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menembak rekan kerjanya sesama polisi berinisial HT (26) hingga tewas di lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi pada 25 Oktober 2021 di rumah korban di Desa Denggen, Selong, Lombok Timur. Pelaku dipecat dari jabatannya dan divonis 17 tahun penjara.

### Penembakan di Polsek Cimanggis

Peristiwa penembakan juga terjadi di Polsek Cimanggis yang menewaskan Bripka RE pada 25 Juli 2019, dipicu atas tersulutnya emosi Brigadir RT karena permintaannya ditolak oleh korban. Atas perbuatannya, Brigadir RT dipecat secara tidak hormat dengan hukuman penjara selama 15 tahun.

### Polisi tertembak senpi rakitan di Bogor

Di Bogor, Bripda IDF tewas tertembak senjata api rakitan ilegal oleh Bripda IM pada 22 Juli 2023 di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas kejadian tersebut, dua anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bripda IMS dan Bripka IG dan diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

### Polisi menembak rekan karena sakit hati di Lampung

Mantan Kanit Provos Polsek Way Pengubuan Rudi Suryanto menembak mati rekannya, Ipda Ahmad Karnain pada 4 November 2022 lalu. Rudi divonis 12 tahun penjara oleh hakim PN Gunung Sugih, Lampung Tengah, pada 5 Januari 2022.

### Adu mulut berujung penembakan di Sulawesi Tengah

Usai terlibat adu mulut, Aiptu P nekat menembak rekannya sendiri, Aipda NS, di Polsek Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada 8 November 2019. Secara tiba-tiba, P menembakkan senjata api ke arah NS di bagian rahang. Karena panik, P kemudian menembak dirinya sendiri.

"Kalau pimpinan mampu memberikan keteladanan, kami percaya anggota kepolisian yang berada di bawah kepemimpinan tersebut pasti akan loyal dan tidak berbuat aneh-aneh," tuturnya.

Sebelumnya, muncul usulan dari berbagai kalangan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI. Usulan itu disampaikan berkaitan dengan isu netralitas dan juga agar memperkuat keamanan nasional. (ist, tmp, wid/dya)